

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2011**

**Fitrah Afrizal**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2011**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**Fitrah Afrizal**  
**A11108294**



JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI BELANJA  
PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI  
SULAWESI-SELATAN TAHUN 2001-2011**

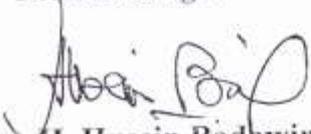
Disusun dan diajukan oleh

**FITRAH AFRIZAL**  
A11108294

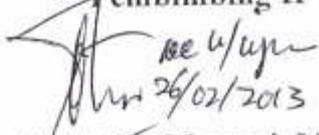
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Februari 2013

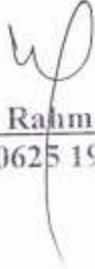
Pembimbing I

  
Drs. H. Husein Badawing, MA  
NIP. 19481016 197412 1 002

Pembimbing II

  
Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si  
NIP. 19590303 198810 1 001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA  
NIP. 19630625 198703 2 001

# SKRIPSI

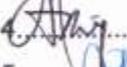
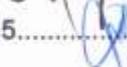
## ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2011

Disusun dan diajukan oleh .

**FITRAH AFRIZAL**  
A111 08 294

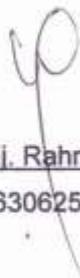
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **14 Mei 2013** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

No	Nama pembimbing/Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Husein Badawing, MA	Pembimbing I	1. 
2	Drs. Bakhtiar Mustari, SE., M.Si.	Pembimbing II	2. 
3	Prof. DR. HJ. Rahmatia, SE., M.Si	Penguji	3. 
4	Dr. Abd. Rahman Razak, SE, MS	Penguji	4. 
5	Dra. HJ. Fatmawati, M.Si	Penguji	5. 

Panitia Penguji dan Pembimbing,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. HJ. Rahmatia, SE., M.A.  
NIP. 196306251987032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fitrah Afrizal  
NIM : A11108294  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

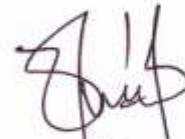
**ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, BELANJA  
PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB DI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2011**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 juli 2013

Yang membuat pernyataan,



Fitrah afrizal

## PRAKATA

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011"**. Salam dan shalawat dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah yang menuntun ummatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, disamping memberikan pengalaman kepada penulis untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Taufik Irawan dan Webungawali atas kesabaran, pengorbanan, nasehat, motivasi, kasih sayang dan do'a yang tidak pernah putus untuk penulis. Serta buat kakak dan adik-adikku tersayang terima kasih atas bantuan dan kesabarannya dalam terselesaikannya penulis skripsi ini. Semoga bisa buat yang terbaik untuk kalian semua, Aamiin.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. DR. Muhammad Ali, SE, MS beserta jajarannya terkhusus pada Wakil Dekan I, dan III. Serta seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama penulis pelajar di kelas.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE., MA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. H. Husein Badawing, MA selaku pembimbing akademik (PA) dan juga sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.si selaku pembimbing II II yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Untuk Pak Parman selaku pegawai akademik jurusan Ilmu Ekonomi semua bantuan dan saran bapak sangat berarti bagi penulis dalam proses menuju seminar proposal sampai proses menuju ujian meja.
6. Pimpinan Badan Pusat Statistik Provinsi di Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti.
7. Buat **A. Nadya Ahsani, SE** terima kasih sudah menjadi penyemangat bagi penulis sehingga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini. Terima kasih juga atas support, motivasi, kesabaran, bantuan, teguran dll yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu. Yang terbaik buat terbaik..
8. Buat ProtectorMan : **Ghiffari Made ali, SE** si raksasa hati-hati melangkah bro nanti ko injak orang.. hhahaha, **Azwar Akib, SH** aka cippe' semoga cepat dapat mama'na bro atau "belok" mko iyya bro..hhahah ,**Rezky Julianry** aka ayam Rembo yang katanya "teman baikku" baru seringji cepat nyusul sarjana juga bro supaya lebih disayang ko sama om daripada rembo..hhahah, **Ince a wahid** Opanya anak-anak cepat nyusul juga sarjananya bro jangan lupa sembunyikan

ekor kalo keluar rumah bro.. uppss, **Muh.Saldi si** dewa gitar yang bayarkan administrasi tes UMBku di hari terakhir pendaftaran Maba kalo nda adako waktu itu bro nda bakalan di unhas ka' bro.. hhahaha, cepat mko sarjana juga bro.

9. **Special Thanks to** anak-anak **ICONIC 08** yang sudah berbagi pengalaman-pengalaman, pelajaran, serta motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Volume08 dan 08stackle terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
11. Keluarga besar KKN Reguler gel. 82 Unhas kabupaten Sidrap Kecamatan panca lautang kelurahan LAJONGA posko gembira, I'll never forget the moments at lajonga.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi UNHAS.

Semoga segala bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 11 juli 2013

Penulis

## ABSTRAK

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dimana Tingkat PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan

Metode Penelitian menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data rentang waktu 11 tahun mulai dari 2001 hingga 2011. Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, investasi PMDN dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB disulawesi Selatan sedangkan belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan

**Kata kunci :** *PDRB, Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, regresi linier berganda.*

## ABSTRACT

GDP is defined as the total value-added generated by unit of the work in a region or is the total value of final goods and services produced by all economic units in a region. Floor where can GDP growth reflects a region economically. High rate of economic growth as shown by the high value of GDP show that area experienced improvement in the economy. The purpose of this study was to see how big the influence of prudential floor, government expenditure and labor against GDP of South Sulawesi.

The research method using multiple linier regression analysis using data from 11 years span of the time from 2001 to 2011. Based on the result of the research could result in domestic investment and FDI investment is positive and significant GDP effect on the South Sulawesi while government expenditure and labor significant and negative effect on the GDP of South Sulawesi

**Keyword :** *GDP, Invesment Level, Government Expenditure, Labor and multiple linier regression.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	8
2.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi	8
2.1.2 Model Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB .....	11
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	16
2.2.1 Tingkat Investasi Terhadap PDRB .....	16
2.2.2 Belanja Pemerintah Terhadap PDRB .....	21
2.2.3 Tenaga Kerja Terhadap PDRB .....	24
2.3 Tinjauan Empiris .....	28
2.4 Kerangka Pikir .....	30
2.5 Hipotesis .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	33
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.4 Metode Analisis Data .....	34
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	35
3.6 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	37
3.7 Uji F Statistika .....	37
3.8 Uji T Statistika .....	38
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN HASIL</b>	
4.1 Gambaran Umum Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.....	39

4.1.1 Keadaan Fisik.....	39
4.1.2 PDRB Sulawesi Selatan..	41
4.1.3 Tingkat Investasi....	43
4.1.4 Belanja Pemerintah.....	47
4.1.5 Tenaga Kerja.....	49
4.2 Analisis Data....	51
4.5.1 Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis.....	51
4.5.2 Analisis Statistik.....	51
4.3 Uji Statistik.....	52
4.6.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	52
4.6.2 Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)....	53
4.6.3 Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji-t).....	54
4.4 Pembahasan....	56
4.7.1 Tingkat Investasi terhadap PDRB....	56
4.7.2 Belanja Pemerintah terhadap PDRB.....	57
4.7.3 Tenaga Kerja terhadap PDRB.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan

kerjadan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikan Negara ini adalah memajukan dan meningkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003 dalam Ravi, 2010).

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, sifat yang *pertama* adalah suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus. *Kedua*, suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per kapita*. *Ketiga*, adalah kenaikan *income per*

*kapita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara Republik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan di setiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB) perkapita (Zaris, 1987).

Bagi Negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana unyuk pembangunan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan investasi.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010).

**Tabel 1.1 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Sulawesi Selatan Tahun 2006-2011**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Milyar)</b>	<b>PDRB (%)</b>
2006	38,867.69	6.72
2007	41,332.43	6.34
2008	44,549.82	7.78
2009	47,314.03	9.20
2010	51,197.03	13.83
2011	55.116.92	15.26
<b>JUMLAH</b>	<b>278.377.92</b>	<b>59.13</b>

*Sumber : Data diolah dari BPS Sulsel*

Berdasarkan pada tabel 1.1 terlihat bahwa PDRB Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2010 sangat jauh mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya yaitu, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 13.83% sedangkan tahun sebelumnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 9.20%. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara berangsur-angsur telah mengalami peningkatan yang positif.

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Sulawesi Selatan mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) karena banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan juga potensi daerah yang dijadikan objek wisata sehingga potensi-potensi daerah ini diberdayakan maka sangat besar manfaatnya dalam menghasilkan devisa Negara dan juga menunjang terciptanya kegiatan ekonomi disekitar daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Untuk terciptanya ekonomi yang berkembang di Sulawesi Selatan maka pembangunan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Sulawesi Selatan harus mampu memanfaatkan seluruh dana yang ada untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal untuk menggerakkan dan memajukan pemasukan daerah, pemerintah Sulawesi Selatan berkewajiban untuk memakai dana sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan semaksimal dan seefisien mungkin. Pembangunan daerah di Sulawesi Selatan diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah ini untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan didaerah Sulawesi Selatan dibutuhkan peran serta sektor swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini.. Sebagai pedoman perencanaan guna meningkatkan pembangunan di daerah Sulawesi Selatan pemerintah harus menggunakan metode pembangunan dari bawah ke atas agar pembangunan ekonomi di daerah ini bisa berkelanjutan dan sesuai dengan harapan kita semua.

Pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Asion, 2009). Namun untuk mencapai tingkat perekonomian yang tinggi tidaklah begitu mudah. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan berbagai faktor pendukung seperti sumber daya alam yang tersedia, stabilitas nasional, belanja pemerintah yang tercantum pada APBD dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dikemukakan masalah yang ingin di sampaikan, yaitu :

- Seberapa besar pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian, yaitu :

- Untuk menganalisis apakah tingkat investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah terhadap khususnya instansi-instansi terkait.
2. Sebagai masukan bagi masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Selatan agar dapat mengetahui kondisi perekonomian yang sedang berjalan.
3. Untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
4. Untuk menambah wawasan penulis menyukai perekonomian Indonesia khususnya daerah Sulawesi Selatan.
5. Memberikan gambaran seberapa besar kontribusi tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Sulawesi Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (Zaris,1987). pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat (Sukirno, 1994). Menurut Prof. Simon Kuznets (dikutip dari Boediono, 1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Samuelson (1995) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/output dari suatu negara.

Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. *Pertama*, sumber daya manusia maksudnya kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. *Kedua*, sumber daya alam dengan faktor produksi adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang

penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

*Ketiga*, pembentukan modal. Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi. *Keempat* adalah perubahan teknologi dan inovasi. Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995).

Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku dan teknologi tersedia (Tambunan, 2001). Menurut Sukirno (1994) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu Negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara.

Sumitro Djojohadikusumo (dalam Sanusi, 2004), perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi

pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian: Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu : aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi (baik legal formal maupun informal) (Arsyad, 1999).

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. perekonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswasta yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995). Menurut boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu sedangkan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini meliputi dua aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu

jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output.

### **2.1.2. Model Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB**

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya adalah pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah “proses”, bukan gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan daerah dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas, tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan mencakup sasaran seperti : *pertama*, dalam usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah, sekaligus untuk menghindari terjadinya jurang perbedaan tingkat pembangunan antar daerah yang semakin dalam. *Kedua*, pengarahannya dalam kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan aspirasi dan potensi yang terdapat di daerah, baik bagi kepentingan perkembangan nasional maupun bagi kepentingan daerah itu sendiri. *Ketiga*, mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar terjalin ikatan-ikatan (ekonomi) antar daerah yang kuat didalam satu rangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. *Keempat*, membina daerah-daerah minus, daerah perbatasan, dan tanah-tanah kritis, dengan program-program khusus (Sanusi, 1987).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi disuatu Negara. "Pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*) pertumbuhan ekonomi adalah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas.

Pembangunan daerah juga diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Tujuan pembangunan yang pertama, untuk pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), peralatan (*man made resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*) dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Dalam hal ini terdapat upaya memadukan kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan teknologi dalam rangka memperbesar produktifitas.

Semakin tinggi tingkat kemampuan sumber daya manusia, besar kemungkinan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia guna mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan tujuan pembangunan yang kedua, yaitu pemerataan yang mempunyai implikasi dalam pencapaian tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak. Sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan

daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya, baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007).

Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat didalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor diluar daerah atau kombinasi keduanya. Suatu pendekatan yang lazim digunakan untuk menjelaskan penentuan-penentuan internasional dari pertumbuhan regional adalah melalui penggunaan model-model ekonomi makro. Model-model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri.

Jika dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus persamaan yang mencerminkan hubungan input output adalah menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005:56), sedangkan menurut BPS Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka produk domestik regional bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

Yang pertama, menurut pendekatan produksi. dalam pendekatan produksi, produk domestik regional bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005).

Yang kedua, menurut pendekatan Pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah,

dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Robinson Tarigan, 2005). Ketiga yaitu, menurut pendekatan pengeluaran. Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Cara penyajian produk domestik regional bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

Pertama, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan. Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

Yang kedua ialah, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. Pengertian Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi

dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB yaitu, mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya dan membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1. Tingkat Investasi Terhadap PDRB**

Menurut Sukirno (2004), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang an jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang

dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik (Boediono, 1992).

Menurut Todaro (1981) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang

modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, kecilnya jumlah mutlak kapita material. Kedua, terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk. Ketiga dan yang terakhir adalah rendahnya investasi netto. Akibat keterbatasan tersebut, Negara-negara berkembang mempunyai sumber daya yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup dan kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal dan taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 1997).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini antara lain perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh adapula asumsi yang menyatakan bahwa dalam perekonomian dua sektor (Rumah

Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. Asumsi lain menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). Asumsi yang terakhir menyatakan kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save =MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal output (*Capital Output Ratio =COR*) dan rasio penambahan modal output (*incremental Capital Output Ratio*). Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan rasio pertambahan modal output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu Negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan public di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Deddy, 2008).

Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi

memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Prasetyo, 2009).

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta

dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

### **2.2.2. Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan PDRB**

Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu Nodiawan (2006). Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan asset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja/biaya berdasarkan hubungannya dengan aktivitas di bagi dua, yaitu biaya langsung

dan biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah),

klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sadono Sukirno, 2000).

Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y) dan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. (*Dornbusch dan Fischer, 1999*) Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh.

Untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman

penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayangnya tidak dijelaskan bagaimana cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual.

karakteristik aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya relatif material. Belanja modal juga mensyaratkan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.

### **2.2.3. Tenaga Kerja Terhadap PDRB**

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Suparmoko, 2002). Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari kerja (Simanjuntak, 1985). Angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari kerja pada tingkat upah yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985). Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya.

Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu peningkatan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*) atas tiga macam. Pertama, tenaga kerja penuh (*full employed*) adalah tenaga kerja yang mempunyai jam kerja  $\geq 35$  jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*) yaitu tenaga kerja dengan jam kerja  $< 35$  jam dalam seminggu. Ketiga, tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja  $0 \geq 1$  jam per minggu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang ditetapkan tanggal 1 oktober 1998 telah ditentukan bahwa batasan minimal usia seorang tenaga kerja di Indonesia adalah 10 tahun atau lebih. Namun Indonesia tidak menganut batasan maksimum usia seorang tenaga kerja. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional yang cukup kuat. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang ikut serta berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan

penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogeny dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancer dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu ( $q$ ) adalah  $q = f(K,L)$  di mana  $K$  merupakan modal dan  $L$  adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternative antara  $K$  dan  $L$  maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan dan

masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (Marginal physical Product).

Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat akan memperlihatkan penurunan produktivitas serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai angkatan kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontiniu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi santosa, 2001).

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan ,melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah. (Kuncoro, 2004)

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Arif Yunarko (2007) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Jawa tengah dengan menggunakan model regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini yaitu investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, hal ini diakibatkan proses perijinan yang sangat rumit di Jawa Tengah sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Hasil yang tidak berpengaruh signifikan juga terjadi pada variabel tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena dalam jangka pendek tenaga kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk jangka panjang pertumbuhan penduduk (bertambahnya angkatan kerja) dapat menurunkan kembali pembangunan ke tahap yang lebih rendah. Sedangkan, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan PAD merupakan indikator kemandirian daerah, sehingga diharapkan dengan pembelanjaan yang tepat sasaran dan di sektor yang potensial maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Nasara, 1997 mengadakan penelitian dengan judul pertumbuhan ekonomi regional Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah

pada 25 provinsi di Indonesia adalah variabel Pembentukan Modal, Tenaga Kerja, Mutu Modal Manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB masing-masing daerah penelitian tersebut.

Wijayanti, 2002 mengadakan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dengan hasil bahwa tenaga kerja mempengaruhi pengaruh yg positif terhadap Pertumbuhan ekonomi kabupaten kudus hal ini disebabkan karena tenaga kerja merupakan faktor produksi sebagai penggerak perekonomian daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah menunjukkan bahwa variable jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten kudus. Dengan koefisien regresi sebesar (2,440) dan angka probabilitas signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 juga memperkuat bukti bahwa jumlah transfer pemerintah pusat walaupun secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.

Amin Pujiati (2008) dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal dimana Pertumbuhan ekonomi (Y), PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), dan Tenaga Kerja (X4). Dengan hasil penelitian bahwa Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa F-hit (14,234) lebih besar dari F-tabel dengan  $\alpha = 0,05$  berarti secara bersama-sama variabel PAD,

DAU, DBH, dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Karesidenan Semarang. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa PAD, DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang.

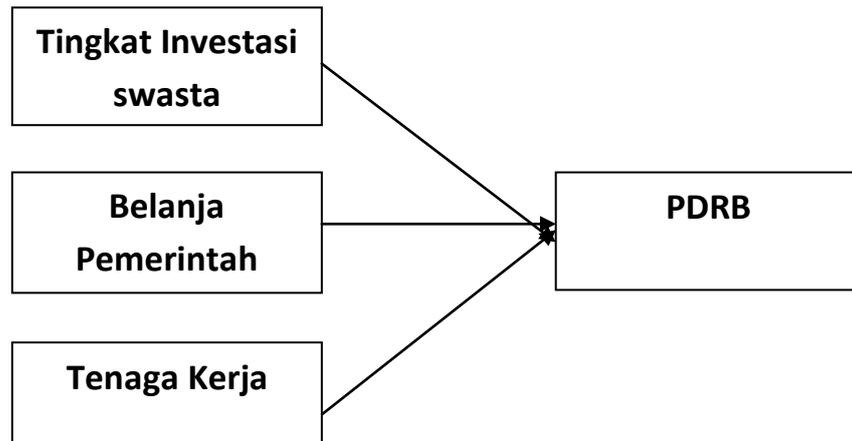
Mardiana Aji (2005) dengan judul skripsi Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 1984-2003. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Y), Investasi (X1), Tenaga Kerja (X2), Total Ekspor (X3) dan Hutang Luar Negeri (X4). Dengan hasil penelitian sebagai berikut, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  $R^2 = 0,990$  dan  $F\text{-hitung} = 388,730$  lebih besar daripada  $F\text{-tabel} (3,01)$ , hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yakni total ekspor, investasi, tenaga kerja, dan hutang luar negeri secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun secara parsial menunjukkan bahwa variabel investasi, ekspor, dan tenaga kerja, masing-masing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara hutang luar negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **2.4 Kerangka Pikir**

Secara ringkas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan titik tolak pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih mandiri. Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan

kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, Propinsi Sulawesi Selatan menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya. Untuk melihat pengaruh tingkat investasi, Belanja Pemerintah dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka digunakan analisis regresi berganda.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Belanja Pemerintah merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja dapat dijadikan indikator dalam peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB).



## 2.5 Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Sesuai dengan masalah di atas dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

1. Tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB.